

Peran Mahasiswa Sebagai Generasi Muda dalam menghadapi Era Society 5.0

Muhamad Hijran¹ Dini Oktariani² Zikri Rahmani³

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung, Indonesia^{1,2}

Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung, Indonesia^{1,2}

Email: muhamad-hijran@ubb.ac.id¹ dini-oktariani@ubb.ac.id² Zikri@ubb.ac.id³

Abstrak

Berbagai peristiwa yang terjadi saat ini terjadinya perselisihan karena adanya setiap warga negara tidak menghargai keberagaman. Selain itu pula, perilaku Mahasiswa yang cenderung individualis menjadi sorotan tajam dalam masyarakat. Disadari atau tidak, teknologi informasi juga turut andil dalam merebaknya pola budaya Barat (*westernisasi*) yang sangat mudah digandrungi oleh sebagian besar Mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran mahasiswa dalam menghadapi Era Society 5.0. Hasil dari penelitian ini didapat bahwa Mahasiswa haruslah setidaknya mempunyai 3 (tiga) kompetensi kewarganegaraan, yang meliputi Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*), dan Watak kewarganegaraan (*civic disposition*). Dengan terjalinya kompetensi kewarganegaraan tersebut, diharapkan dapat mewujudkan mahasiswa yang terlibat aktif dalam suatu tatanan negara dan menghadapi Era Society 5.0.

Kata Kunci: Mahasiswa, Generasi Muda, Era Society 5.0

Abstract

Various events that occurred at this time the occurrence of disputes because every citizen does not respect diversity. Apart from that, the behavior of youth who tend to be individualistic has become a sharp focus in society. Whether we realize it or not, information technology has also contributed to the spread of Western cultural patterns (westernization) which are very easily loved by most students. This study aims to find out how the role of students in dealing with Era Society 5.0. The results of this study found that students must have at least 3 (three) citizenship competencies, which include civic knowledge, civic skills, and civic disposition. With the establishment of civic competence, it is hoped that students will be actively involved in a state system and face the Era of Society 5.0.

Keywords: Students, Young Generation, Era Society 5.0



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Dari berbagai peristiwa yang terjadi saat ini terjadinya perselisihan karena adanya setiap warga negara tidak menghargai keberagaman. Selain itu pula, perilaku Mahasiswa yang cenderung individualis menjadi sorotan tajam dalam masyarakat. Disadari atau tidak, teknologi informasi juga turut andil dalam merebaknya pola budaya Barat (*westernisasi*) yang sangat mudah digandrungi oleh sebagian besar Mahasiswa. Menurut (Fauzi & Roza, 2019: 93) Memasuki abad ke 21, dunia internasional termasuk Indonesia mengalami berbagai macam perubahan seperti batas-batas antar negara menghasilkan warga negara global dan menjadikan manusia yang bergantung kepada IPTEK kemudian perubahan mempengaruhi juga terhadap aspek kehidupan, politik, ekonomi, sosial, budaya dan aspek lainnya. Sependapat dengan (Asyari & Dewi, 2021: 31) bahwa Globalisasi disebabkan oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi telah menjadikan dunia semakin transparan, sehingga Mahasiswa perlu dibekali pendidikan kewarganegaraan untuk mempengaruhi pemikiran, mental, dan sikap Mahasiswa yang menjadi harapan generasi penerus bangsa. Kemudian (Pangalila, 2017: 91) mengatakan bahwa kuatnya

arus globalisasi semakin menambah rumit persoalan kebangsaan Indonesia, seperti persoalan-persoalan korupsi, kekerasan atas nama agama, kerusuhan antar siswa. Oleh sebab itu, perlu pemahaman kesadaran berbangsa dan bernegara secara efektif dan efisien guna menumbuhkan semangat kebangsaan, sikap rela berkorban demi bangsa dan negara. Westernisasi yang diwakili oleh bentuk gaya hidup, seni, dan pemikiran telah mengakar dalam berbagai bentuk, termasuk media yang merupakan alat hasil perkembangan teknologi informasi. Seperti yang dikemukakan oleh (Reza, 2022) Akses informasi yang sangat mudah didapatkan dan mudah pula untuk dibagikan menjadi efek baik sekaligus juga efek yang buruk bagi perkembangan IT. Tidak sedikit berita bohong yang berkembang dan dramaturgi yang dimainkan melalui riasan media. Bahkan dampak yang juga tidak kalah berbahayanya adalah ketika masyarakat mulai mendapati biasanya kebenaran akan sebuah informasi. Sehingga banyak masyarakat yang mudah mempercayai sesuatu hanya karena melihat satu unggahan dari sebuah media massa maupun media sosial.

“Kebohongan yang diceritakan satu kali merupakan sebuah kebohongan, namun kebohongan yang diceritakan ribuan kali akan menjadi sebuah kebenaran”, ungkapan Paul Joseph Goebbles yang merupakan seorang politisi Jerman era Hitler ini tidak ada salahnya untuk kita pelajari dalam menghadapi era yang penuh bias akan kebenaran atau disebut era *Post Truth*. Dewasa ini marak sekali informasi yang muncul melalui berbagai media, bergerak seolah merupakan kebenaran namun ternyata tidak benar sama sekali. Maka dari itu istilah hoax menjadi salah satu kata populer dalam satu dekade terakhir ini. Kebohongan demi kebohongan diciptakan oleh pihak tertentu dengan sengaja sehingga masyarakat secara sadar menganggap bahwa kebohongan tersebut merupakan sebuah kebenaran karena intensitas pengulangan informasi yang tinggi dan juga kepercayaan masyarakat yang sudah terbentuk. Maka jelas ungkapan Goebbles semakin nyata hari ini. Kemudahan akan mempercayai sesuatu di era *Post Truth* tanpa melakukan peninjauan kembali terhadap informasi yang didapatkan merupakan sikap yang mencerminkan masalah dalam berpikir, karena di era ini kebenaran tidak dapat diterima hanya dari satu rujukan sumber. Menghadapi dinamika dan masalah bangsa Indonesia dewasa ini, warga negara perlu memiliki kecakapan dan kebijaksanaan untuk memfiltrasi segala informasi yang didapatkan dan mengkonfirmasinya sebelum menjustifikasi benar atau salah.

Sementara itu (Waldi, 2019: 17) mengemukakan bahwa pada saat ini watak warga negara belum menunjukkan karakter yang baik, seperti banyak perilaku warga negara yang menyimpang tidak sesuai dengan nilai moral dan norma yang berada di masyarakat Kebiasaan Mahasiswa sekarang ini sering terjadi permasalahan yang serius yaitu mengenai kemerosotan moral, perilaku penyimpangan seperti tindakan asusila, pergaulan bebas, penyalahgunaan obat-obat terlarang serta perilaku yang menyimpang dengan nilai-nilai yang berlaku dalam berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu menurut (Sujana, 2019: 70) mengemukakan bahwa *civic virtue* bagi setiap warga negara sangat penting sebagai tiang penyanggah globalisasi sehingga Pendidikan Kewarganegaraan harus ditanamkan secara efisien kepada siswa selaku Warga negara Muda (*Young Citizen*). Oleh sebab itu, sebagai bangsa yang besar kita mesti optimis bahwa visi Indonesia Emas 2045 bukan sekedar angan dan isapan jempol belaka. Kita sudah mengetahui jalan untuk menuju ke sana, yakni dengan mengembangkan kapasitas ilmu pengetahuan masyarakat melalui pendidikan serta tak lupa mendorong eskalasi kualitas karakter secara bersamaan sehingga lahir generasi emas yang cerdas dan berkarakter.

Tugas dan tanggung jawab yang harus terus didorong adalah melakukan sebaik-baiknya usaha untuk membina generasi muda melalui pembinaan dan pengawasan kolaboratif antara keluarga, sekolah/ perguruan tinggi, serta lingkungan masyarakat. Apabila semua pihak menyadari hal ini maka bukan tidak mungkin lahirnya masa cemerlang Indonesia melalui

generasi emasnya dapat benar-benar terwujud. Tidak hanya pada tahun 2045, bahkan bisa lebih cepat daripada itu. Sehingga bangsa ini dapat maju dan berdiri sebagai pusat peradaban dunia

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah Literatur review yang merupakan suatu kajian ilmiah yang berfokus pada satu topik tertentu. Literatur review akan memberikan gambaran mengenai perkembangan suatu topik tertentu (Agus Cahyono, dkk: 2019). Sementara itu (Hijran & Dini, 2019) mengemukakan bahwa Pengumpulan Literature review digunakan beberapa tahapan diantaranya pencarian artikel berdasarkan topic garis besar, pengelompokan artikel berdasarkan relevansi dengan topik. Sebelum mengambil kesimpulan, sumber yang telah dikumpulkan, dianalisis, kemudian menulis, lalu mengolah data menjadi informasi yang relevan dengan tema artikel yang diangkat pada artikel ini. Proses pengumpulan data dengan pendekatan study literature, yakni dari sumber data melalui jurnal, artikel yang berkaitan dengan judul yang peneliti angkat (Nurohmah & Dewi, 2022). Literatur review akan memungkinkan seorang peneliti untuk melakukan identifikasi atas suatu teori atau metode, mengembangkan suatu teori atau metode, mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi antara suatu teori dengan relevansi di lapangan / terhadap suatu hasil penelitian (Rowley & Slack, 2004; Bettany-Saltikov, 2012).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Mahasiswa merupakan tulang punggung bagi suatu bangsa karena sebagai generasi penerus yang harus dimanfaatkan dan dikelola dengan baik agar mempunyai kompetensi yang memadai. Mahasiswa haruslah setidaknya mempunyai 3 (tiga) kompetensi kewarganegaraan, seperti yang diungkapkan (Branson, 1999) meliputi Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*), dan Watak kewarganegaraan (*civic disposition*). Oleh sebab itu, mahasiswa perlu memiliki pengetahuan yang baik tentang kewarganegaraan kemudian perlu memiliki kecakapan secara intelektual dan interaktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga pada akhirnya hasil belajar yang berupa pengetahuan dan keterampilan akan membentuk watak atau karakter yang membentuk sikap dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan kewarganegaraan yang baik, menunjukkan sikap toleransi dalam beragama, kejujuran, keadilan, demokrasi, menghargai dan menghormati Hak Asasi Manusia, serta mempunyai semangat kebangsaan dan rasa solidaritas yang tinggi. Dengan terjalinya kompetensi kewarganegaraan tersebut, diharapkan dapat mewujudkan Mahasiswa yang terlibat aktif dalam suatu tatanan negara.

1. Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*)

Civic knowledge menjadi konsep dasar menanamkan pengetahuan tentang kewarganegaraan bagi Mahasiswa agar kelak menjadi warga negara yang *smart and good citizen* yang sesuai dengan nilai kebangsaan yaitu Pancasila dan Undang-undang 1945. Pengetahuan Kewarganegaraan (*civic knowledge*) prinsipnya harus diketahui dan tentunya di implementasikan oleh mahasiswa yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini diperkuat oleh (Mulyono, 2017: 220) bahwa aspek dari *civic knowledge* ini menyangkut kemampuan akademik-keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum dan moral. Sebagai Mahasiswa tentunya harus dikuasai kompetensi tersebut, sehingga dapat membentuk daya kritis, kepedulian, persatuan dan integritas. Sejalan dengan hal ini, (Belladonna & Anggraena, 2019: 209) mengemukakan bahwa *civic knowledge* mengandung pengetahuan tentang kebangsaan dan kewarganegaraan. Disinilah perlunya

pendidikan karakter, seperti yang dikemukakan oleh (Hartini, 2020: 15) kehadirannya yang dimulai sekolah, keluarga dan masyarakat, dapat dikatakan sebagai salah satu upaya yang strategis dalam membangun karakter Indonesia yang telah menjadi negara multikultural. Oleh sebab itu, dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan harus dilaksanakan secara efisien agar dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif ke arah yang lebih baik. Seperti yang dikemukakan oleh (Reza, 2022) Indonesia memprioritaskan pendidikan sebagai suatu hal yang sangat utama, bahkan upaya dalam pembangunan pendidikan termuat dalam tujuan nasional yang termaktub pada Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 untuk senantiasa mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selaras dengan tujuan Indonesia Emas 2045, pendidikan yang berkualitas perlu dilaksanakan sejak dini dengan membekali kapasitas para pelajar dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Pendidikan saat ini juga perlu menunjang kemampuan yang aplikatif, maka penting sekali bagi para siswa dibekali soft skill yang dapat ditunjang melalui pelaksanaan ekstrakurikuler di sekolah. Selain peningkatan wawasan, dalam proses pendidikan juga perlu dikembangkannya karakter baik yang dapat menunjang keselarasan kecerdasan dan sikap bagi setiap siswa. Pendidikan karakter bukan saja menjadi pelengkap dalam pengembangan kapasitas SDM, namun juga merupakan suatu hal pokok yang tidak kalah pentingnya dari kemampuan berpikir.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Kemendikbud) melalui press release beberapa waktu lalu menjelaskan bahwa salah satu visi Indonesia ke depan adalah terwujudnya Indonesia Emas 2045 (kemenkopmk.go.id). Visi tersebut sejatinya bukanlah hal yang mustahil apabila mempertimbangkan beberapa aspek, seperti jumlah penduduk negeri ini pada tahun 2045 yang cenderung berusia produktif serta kematangan usia bangsa yang pada tahun tersebut telah mencapai angka seratus. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia menjadi SDM yang unggul dan berkualitas. Upaya peningkatan ini tentunya perlu menyasar pada semua tingkat perkembangan manusia Indonesia, bahkan dapat dimulai dari sejak dini. Secara perhitungan, anak-anak yang saat ini berusia di bawah 10 tahun akan berusia produktif pada tahun 2045. Maka dari itu perhatian pada anak usia dini menjadi hal yang memiliki urgensi tinggi. Perkiraan jumlah penduduk Indonesia tahun 2045 berkisar 310 juta jiwa dan sekitar 70% dari angka tersebut adalah penduduk produktif (berusia 15-64 tahun). Jumlah yang sangat banyak ini haruslah terbina dan terdidik dengan baik. Visi Indonesia Emas 2045 malah dapat berpotensi menjadi petaka apabila usia produktif tersebut tidak memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menjalani kehidupan dan mendorong kemajuan bangsa.

Menurut teori "korelasi" hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hak warga negara yaitu otoritas warga negara untuk melakukan sesuatu menurut undang-undang yang berlaku. Dengan kata lain, hak warga negara adalah hak istimewa yang mengharuskan warga negara untuk diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Adapun hak warga negara menurut Undang-Undang 1945 adalah: Hak berserikat dan berkumpul, Hak dalam upaya pembelaan negara, Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Persamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan, Hak mendapat pengajaran, Hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, dan Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Sedangkan kewajiban warga negara yaitu suatu keharusan yang tidak bisa ditinggalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh warga negara. Disnilah diperlukannya sikap tanggung jawab sebagai warga negara, dan dari makna pengertian hak dan kewajiban tersebut tersirat bahwa bersumber dari negara. Warga negara mempunyai berbagai kewajiban sebagaimana tercantum

dalam Undang-undang 1945 seperti: Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, Turut serta dalam upaya pembelaan negara, dan menjunjung hukum dan pemerintahan.

Peran pemerintah disinilah mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan untuk seluruh warga negara berdasarkan prinsip desentralisasi dan sentralisasi. Oleh karena itu, sebagai warga negara juga harus mengetahui hak dan kewajibannya sehingga dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri yaitu untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian dari pada itu, tujuan dari pendidikan kewarganegaraan dalam mewujudkan generasi penerus bangsa yaitu yang memiliki kemampuan berpikir kritis, berwawasan, kreatif dan cerdas dalam menyikapi persoalan kewarganegaraan. Pada akhirnya, *output* dari hasil belajar pendidikan kewarganegaraan akan membentuk Mahasiswa yang mempunyai karakter yang kuat, sehingga menjadi perilaku dan kebiasaan hidup yang menjadikan warga negara yang baik dan terdidik, dengan mempunyai sikap toleran, jujur serta mencintai tanah air, membangun rasa kebangsaan dan berkepribadian Indonesia.

2. Kecakapan Kewarganegaraan (*Civic Skills*)

Kecakapan kewarganegaraan perlu dikembangkan agar *Civic Knowledge* yang di dapatkan menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bermakna dalam menghadapi permasalahan berbangsa dan bernegara. Kecakapan kewarganegaraan terdiri dari kecakapan intelektual dan kecakapan partisipasi. Oleh sebab itu, Kecakapan Kewarganegaraan (*Civic Skills*) ini bagian dari implikasi dari Pengetahuan Kewarganegaraan yang di dapatkan. Kecakapan Kewarganegaraan yang dimiliki oleh Mahasiswa dapat dilihat dari kapabilitas dalam mengkritisi kebijakan publik. Mahasiswa kadang bersikap apatis terhadap segala hal ikhwal akibat penggiringan kebijakan publik yang muncul.

a. Kecakapan Intelektual

Kecakapan Intelektual yaitu terbentuknya Mahasiswa yang berwawasan luas, interaktif, bertanggungjawab seperti keterampilan berpikir kritis. Berpikir kritis yang dimaksud seperti bagaimana sebagai Mahasiswa mengidentifikasi persoalan publik, kemudian bagaimana cara mendeskripsikannya, setelah itu menafsirkan dari persoalan tersebut, selanjutnya cara menguraikan permasalahan yang tengah dihadapi, kemudian mengklarifikasi permasalahannya, serta mengevaluasi, setelah itu menentukan permasalahannya dan mempertahankan pendapatnya yang berkaitan dengan permasalahan publik. Hal ini memberikan kontribusi positif bagi Mahasiswa untuk mengembangkan diri dalam kancah .

Tabel 1. Komponen Kecakapan Intelektual

No.	Unsur Kecakapan Intelektual	Indikator
1.	Mengidentifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Membedakan • Mengkelompokkan/mengklasifikasi • Menentukan bahwa sesuatu itu asli
2.	Mendeskripsikan	<ul style="list-style-type: none"> • Proses • Lembaga • Fungsi • Alat • Tujuan • Kualitas
3.	Menafsirkan/Menjelaskan	<ul style="list-style-type: none"> • Sebab-sebab terjadinya suatu peristiwa • Makna dan pentingnya peristiwa atau ide • Alasan bertindak

4.	Menguraikan/Menganalisis	<ul style="list-style-type: none"> • Unsur-unsur atau komponen ide gagasan, proses politik, institusi-institusi • Konsekuensi dari ide, proses politik, institusi-institusi • Memilih mana yang merupakan cara dengan tujuan, • Memilih mana yang merupakan fakta dan pendapat • Memilih mana yang merupakan tanggungjawab pribadi • Memilih mana yang merupakan tanggungjawab publik
5.	Mengklarifikasi/Menjelaskan	<ul style="list-style-type: none"> • Sebab-sebab terjadinya suatu peristiwa • Makna dan pentingnya peristiwa atau ide gagasan • Alasan bertindak
6.	Mengevaluasi Pendapat	<ul style="list-style-type: none"> • Kelebihan dan kelemahan pendapat • Menciptakan pendapat baru
7.	Mengambil Pendapat	<ul style="list-style-type: none"> • Dari hasil seleksi berbagai posisi • Membuat pilihan baru
8.	Mempertahankan Pendapat	<ul style="list-style-type: none"> • Mengemukakan pendapat berdasarkan asumsi atau posisi yang dipertahankan • Merespon posisi yang tidak disepakati

Sumber: diolah dari Center For Civic Education (1994). *National Standard for Civics and Government*

Sementara itu ada beberapa butir kompetensi dasar dari Kecakapan Intelektual yaitu: Mengemukakan pikiran secara lisan dan atau tulisan dalam bahasa Indonesia yang baik, Menganalisis masalah kemasyarakatan secara kritis, dan Mengambil keputusan individual atau kelompok. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa dalam membentuk Mahasiswa diperlukan penguasaan kompetensi kewarganegaraan yang saling terikat satu sama lain dan mampu di implementasikan dalam wujud perilaku dan perbuatan sebagai warga negara yang *smart and good citizen*.

b. Kecakapan Partisipasi

Kecakapan Partisipasi mempunyai makna yang beragam yaitu suatu wujud peran serta masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya dimulai dari perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa dan negara. Seperti yang dikemukakan oleh (Roza, 2020: 191) Kualitas demokrasi dalam sebuah negara ditentukan oleh kualitas partisipasi warganya, oleh sebab itu keterlibatan warga negara dalam melakukan partisipasi dimungkinkan karena tersedianya ruang yang cukup untuk melakukan partisipasi yang dijamin oleh negara, kemampuan dan keterampilan dari warga negara untuk berpartisipasi dalam bentuk dan berbagai aspek. Bukti nyata dari kecakapan partisipasi itu sendiri berupa saran, jasa atau materi dalam suasana demokratis. Dengan demikian kecakapan partisipasi diperlukan untuk Mahasiswa selain kecakapan intelektual dalam masyarakat demokratis diperlukan kecakapan untuk berpartisipasi yang efektif, bertanggung jawab, serta ilmiah dalam proses berpolitik dan dalam masyarakat sipil.

Tabel 2. Komponen Kecakapan Partisipasi

No.	Unsur Kecakapan Keterampilan	Indikator
1.	Berkomunikasi atau berinteraksi yang kaitannya dengan Permasalahan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Bertanya, Menjawab • Berdiskusi dengan Sopan Santun • Menjelaskan Artikulasi Kepentingan • Membentuk Koalisi, Negoisasi, Kompromi

		<ul style="list-style-type: none"> • Mengelola Konflik secara Damai • Mencari Konsensus
2.	Memonitor yang berkaitan dengan Permasalahan Politik dalam penanganan Permalahan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Memakai berbagai sumber informasi seperti TV, Surat Kabar, Perpustakaan dan lain-lain untuk mengetahui persoalan-persoalan publik • Upaya mendapatkan informasi tentang persoalan publik dari kelompok-kelompok kepentingan, pejabat pemerintahan, lembaga-lembaga pemerintah.
3.	Mempengaruhi proses politik, pemerintah secara formal dan informal	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan simulasi yang berkaitan dengan kampanye, pelaksanaan pemilu dan kemudian dengar pendapat dengan DPRD/DPR. • Memberikan Pilihan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum • Membuat Petisi • Melaksanakan Pembicaraan kesaksian di depan lembaga publik • Bergabung dalam lembaga advokasi untuk memperjuangkan tujuan bersama atau dengan pihak lain

Sumber: diolah dari Center For Civic Education (1994). *National Standard for Civics and Government*

Kecakapan keterampilan diatas dapat dikategorikan sebagai Berinteraksi (*interacting*), Memonitor (*monitoring*) serta Mempengaruhi (*Influencing*). Berinteraksi berkaitan dengan kecakapan sebagai warga negara dalam berkomunikasi serta berkerjasama dengan orang lain. Interaksi disini berarti bagaimana sebagai Mahasiswa seperti bertanya, menjawab dan berdiskusi secara santun. Dengan demikian juga diperlukan membangun relasi dan bagaimana menghadapi berbagai konflik dengan cara damai dan jujur. Sedangkan yang dimaksud dengan memonitor seperti bagaimana kecakapan Mahasiswa *Monitoring* pelaksanaan politik dan pemerintah untuk terlibat dalam proses tersebut. Selain itu pula, memonitor berfungsi sebagai pengawasan warga negara, dan pada akhirnya kecakapan partisipasi sangat penting membangun kecakapan tersebut sejak dini awal bersekolah dan terus berlanjut sampai ke bangku perkuliahan. Kecakapan tersebut, bagaimana dapat berinteraksi dengan kelompok-kelompok dalam rangka mencari informasi, saling bertukar pikiran, dan bagaimana menyusun rencana yang sesuai dengan taraf kedewasaan sehingga dapat belajar bagaimana cara menyimak dengan penuh perhatian, bertanya secara efisien dan efektif kemudian bagaimana cara mengelola konflik melalui Mediasi dan secara musyawarah mufakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa terkait kecakapan partisipasi bagaimana kemampuan Mahasiswa dapat mempengaruhi kebijakan publik dan menerima keputusan melalui kerjasama dengan pihak lain secara musyawarah, serta memberikan penjelasan secara jelas sehingga suatu permasalahan yang dipaparkan dapat diketahui oleh pemangku kebijakan serta dapat mengelola konflik dilingkungan masyarakat sekitar.

3. Watak Kewarganegaraan

Watak Kewarganegaraan yaitu merupakan karakter atau sifat yang harus dimiliki sebagai Mahasiswa untuk mendukung keefektifan partisipasi politik serta berfungsinya sistem politik yang sesuai dengan Konstitusi, serta dapat berkembangnya kecakapan dalam hal ihwal yang berkaitan dengan kebijakan publik. Tujuan Utama dari watak kewarganegaraan sendiri menurut Branson (dalam Mulyono 2017: 219) yaitu untuk mengembangkan karakter warga

negara yang baik dalam watak pribadi (privat) seperti; bertanggung jawab secara moral, disiplin diri dan penganugrahan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap orang maupun watak publik seperti berpikir secara kritis, kemampuan untuk mendengar, bernegosiasi, dan berkompromi. Pengetahuan merupakan modal yang sangat penting bagi kehidupan setiap manusia, namun karakter juga memiliki tempat yang luar biasa. Sejatinnya sebagai makhluk sosial kita perlu watak dan sikap yang baik dan selaras dengan norma sehingga dapat hidup berdampingan dengan manusia lainnya.

Stephen Covey (1991) dalam bukunya yang berjudul *Principle Centered Leadership* menuturkan bahwa betapa pun berbahayanya sedikit pengetahuan, akan jauh lebih berbahaya lagi memiliki banyak pengetahuan tanpa karakter kuat dan berprinsip. Covey mengibaratkan seorang dengan kapasitas intelektual yang mumpuni namun tidak memiliki karakter internal yang baik seperti menyerahkan mobil sport bertenaga tinggi kepada anak remaja yang kecanduan narkoba. Korelasi penuturan Covey dengan visi Indonesia pada tahun 2045 dapat dipahami bahwa kurangnya pengetahuan adalah hal yang membahayakan bagi bangsa ini. Namun jauh lebih buruk lagi ketika negeri ini diisi oleh banyak orang yang pintar namun tidak memiliki karakter yang berintegritas, karena kepintarannya justru hanya dapat menimbulkan kecenderungan untuk merugikan orang lain. Maka dari itu penanaman nilai karakter menjadi hal yang mutlak untuk terus dilaksanakan.

Berdasarkan Kemendiknas (2010) terdapat delapan belas nilai karakter yang perlu dikembangkan pada individu warga negara Indonesia, yakni religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/ komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. Sejatinnya kedelapan belas nilai karakter tersebut adalah gambaran nilai-nilai yang penting untuk diinternalisasikan kepada warga negara Indonesia terutama dalam upaya menunjang terwujudnya generasi Emas 2045. Betapa luar biasanya apabila setiap warga negara memiliki nilai-nilai karakter tersebut dalam dirinya. Aspek religius, aspek sosial, aspek pribadi, hingga aspek pengetahuan tercakup pada delapan belas nilai karakter tersebut.

Pendidikan karakter harus memiliki pijakan dalam melaksanakannya agar mendapatkan hasil yang baik. Ada beberapa landasan yang seharusnya menjadi pijakan dalam mewujudkan pendidikan karakter tersebut. Dalam melaksanakan pendidikan karakter baik pemerintah selaku pembuat kebijakan, guru sebagai pelaksana serta semua komponen pendukung terlaksananya pendidikan karakter harus mengacu atau perpegangan pada beberapa landasan. Acuan ini dimaksud agar dalam melaksanakan pendidikan karakter tidak menyimpang dari jati diri bangsa Indonesia. Beberapa landasan itu diantaranya adalah landasan agama, Pancasila, dan Budaya (Fadilah & Dkk, 2021). Berdasarkan ketiga landasan tersebut, ada landasan utama yaitu tujuan Pendidikan Nasional. Seperti yang telah termaktub dalam Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 3 bahwasanya tujuan dari Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Fadilah & Dkk, 2021)

Kerangka acuan pendidikan karakter Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional (2010) menyebutkan bahwa pendidikan karakter dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara

lebih khusus pendidikan karakter memiliki tiga fungsi utama, yaitu: Membentuk dan mengembangkan potensi manusia atau warga negara Indonesia agar berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik sesuai dengan falsafah hidup Pancasila; Memperbaiki karakter manusia dan warga negara Indonesia yang bersifat negatif dan memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi manusia atau warga negara menuju bangsa yang berkarakter, maju, mandiri, dan sejahtera, dan Memilih nilai-nilai budaya bangsa sendiri dan menyaring nilai-nilai budaya bangsa lain yang positif untuk menjadi karakter manusia dan warga negara Indonesia agar menjadi bangsa yang bermartabat.

Penanaman karakter menjadi tanggung jawab bagi setiap elemen yang bersinggungan langsung dalam aktivitas kehidupan seseorang. Secara sederhana, tempat penyelenggaraan pendidikan karakter bagi seorang anak disebut dengan istilah tri pusat pendidikan yang meliputi lingkungan keluarga, sekolah, serta lingkungan masyarakat. Melalui tri pusat pendidikan yang digagas Ki Hadjar Dewantara ini maka pelaksanaan pendidikan karakter seseorang akan lebih bersifat kuat dan holistik karena dilaksanakan secara simultan di antara satu lingkungan ke lingkungan lainnya. Sependapat dengan (Reza, 2022) mengemukakan bahwa Penanaman karakter menjadi tanggung jawab bagi setiap elemen yang bersinggungan langsung dalam aktivitas kehidupan seseorang. Secara sederhana, tempat penyelenggaraan pendidikan karakter bagi seorang anak disebut dengan istilah tri pusat pendidikan yang meliputi lingkungan keluarga, sekolah, serta lingkungan masyarakat. Melalui tri pusat pendidikan yang digagas Ki Hadjar Dewantara ini maka pelaksanaan pendidikan karakter seseorang akan lebih bersifat kuat dan holistik karena dilaksanakan secara simultan di antara satu lingkungan ke lingkungan lainnya.

Sebagai bangsa yang besar kita mesti optimis bahwa visi Indonesia Emas 2045 bukan sekedar angan dan isapan jempol belaka. Kita sudah mengetahui jalan untuk menuju ke sana, yakni dengan mengembangkan kapasitas ilmu pengetahuan masyarakat melalui pendidikan serta tak lupa mendorong eskalasi kualitas karakter secara bersamaan sehingga lahir generasi emas yang cerdas dan berkarakter. Tugas dan tanggung jawab yang harus terus didorong adalah melakukan sebaik-baiknya usaha untuk membina generasi muda melalui pembinaan dan pengawasan kolaboratif antara keluarga, sekolah/ perguruan tinggi, serta lingkungan masyarakat. Apabila semua pihak menyadari hal ini maka bukan tidak mungkin lahirnya masa cemerlang Indonesia melalui generasi emasnya dapat benar-benar terwujud. Tidak hanya pada tahun 2045, bahkan bisa lebih cepat daripada itu. Sehingga bangsa ini dapat maju dan berdiri sebagai pusat peradaban dunia. Sementara itu Watak kewarganegaraan mencakup watak pribadi (Privat) dan Watak Kemasyarakatan (Publik) meliputi:

Tabel 3. Watak Kewarganegaraan

No.	Unsur Watak Kewarganegaraan	Indikator
1.	Menjadi anggota Masyarakat yang mandiri (Independen)	<ul style="list-style-type: none"> Watak atau karakter ini merupakan ketaatan secara sukarela terhadap peraturan yang berlaku serta bertanggung jawab atas semua konsekuensi yang timbul dari tindakan mereka dan menerima kewajiban secara moral dan taat pada hukum yang berlaku dalam masyarakat.
2.	Memenuhi tanggung jawab hak-hak sipil pribadi di bidang ekonomi dan politik	<ul style="list-style-type: none"> <i>Up to date</i> tentang isu-isu publik Memberikan suara dalam pemilihan Melakukan Pembayaran Pajak Memberikan layanan kepada masyarakat

		<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Tugas sebagai pimpinan sesuai kemampuan dan bakat
3.	Menghargai harkat dan martabat kemanusiaan setiap individu	<ul style="list-style-type: none"> • Mendengarkan pendapat orang lain • Berperilaku Sopan Santun • Mengormati Hak dan Kewajiban sesama warga negara
4.	Ikut Berpartisipasi dalam segala urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Watak atau karakter ini yaitu ikut serta dalam memberikan Suara pada pemilihan Umum atau ikut berpartisipasi dalam kebijakan publik, serta keterlibatan dalam diskusi yang secara efektif dan memegang kendali sikap kepemimpinan sesuai dengan norma yang berlaku. • Mempunyai kemampuan untuk membuat evaluasi secara tepat. Serta bisa bersikap profesional bisa mengesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan umum. <p>Sifat watak atau karakter berpartisipasi dalam urusan kewarganegaraan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keberadaan (civility) seperti: <ul style="list-style-type: none"> • Menghargai serta menghormati orang lain • Menghargai pendapat orang lain • Mendengarkan pandangan orang lain secara seksama • Menghindari argumen secara emosional dan tidak masuk di akal b. Menghormati hak orang lain yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Menghormati hak orang lain bahwa mereka mempunyai suara dalam pemerintahan • Menghargai sesama karena dimata hukum semuanya sama • Menghormati hak orang lain untuk berpendapat dalam menyampaikan gagasannya dalam suatu asosiasi untuk mengajukan pandangan-pandangannya c. Menghormati Hukum yaitu <ul style="list-style-type: none"> • Mematuhi Hukum bahkan ketika tidak menyepakatinya • Melakukan tindakan secara damai dan legal untuk mengubah hukum yang tidak adil. d. Jujur yaitu suatu sikap yang menyatakan sebenarnya tidak berbohong e. Berpikiran secara terbuka yaitu menghargai pandangan orang lain f. Berpikir secara kritis yaitu kehendak untuk menanyakan kebenaran g. Melakukan Negoisasi yaitu kesediaan untuk membuat kesepakatan dengan orang lain h. Tidak mudah putus ada yaitu kemauan untuk mencoba berulang kali untuk mencapai suatu tujuan i. Memiliki berpikir secara kewarganegaraan yaitu memiliki kepedulian terhadap persoalan – persoalan publik j. Memiliki rasa Empati yaitu mempunyai kepedulian terhadap sesama k. Patriotisme yaitu mempunyai loyalitas terhadap nilai demokrasi secara konstitusional l. Keteguhan yaitu Kuat terhadap pendirian m. Toleran yaitu sikap menghargai perbedaan antar sesama manusia

5.	Mengembangkan Fungsi demokrasi secara konstitusional	<ul style="list-style-type: none"> • Watak ini mengarahkan warga negara agar bekerja secara profesional dan legal sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Watak yang termasuk dalam karakter ini adalah <ol style="list-style-type: none"> a. Sadar Informasi dalam urusan kebijakan publik b. Melakukan penelaahan terhadap nilai dan prinsip konstitusional
----	--	---

Sumber: diolah dari Center For Civic Education (1994). *National Standard for Civics and Government*

Disinilah dibutuhkan budaya kewarganegaraan untuk membentuk watak negara yang *smart and good citizen*. Salah satu dari unsur kebudayaan kewarganegaraan yaitu kebajikan kewarganegaraan (*civic Virtue*) yang sesuai dari nilai Pancasila mencakup keaktifan warga negara, hubungan kesejajarannya, saling percaya satu sama lain, toleran terhadap sesama, kooperatif, memiliki sikap solidaritas dan semangat kebangsaan. Seperti yang diutarakan oleh Winataputra (2012 : 60) mengungkapkan bahwa: "sasaran pengembangan *civic virtue* dan *civic participation* adalah untuk mengembangkan watak dan karakter warga negara yang peka, tanggap, dan bertanggungjawab terhadap masyarakat, bangsa, dan negaranya...*Civic Virtue* atau kebajikan atau akhlak kewarganegaraan mencakup keterlibatan aktif warga negara, hubungan kesejajaran/egaliter, saling percaya dan toleran, kehidupan yang kooperatif, solidaritas, dan semangat kemasyarakatan". Watak kewarganegaraan disini merupakan kompetensi yang paling esensial dan sehingga dapat di pandang "hilir" dari pengembangan kompetensi pengetahuan dan kecakapan kewarganegaraan.

KESIMPULAN

Mahasiswa dalam menghadapi Era Society 5.0 setidaknya harus mempunyai 3 Kompetensi yaitu, Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*), dan Watak kewarganegaraan (*civic disposition*). Sehingga bahwa melalui internalisasi akan dapat menumbuhkan perilaku dan sikap kewarganegaraan yang baik dan cerdas dari seorang Mahasiswa, baik sebagai makhluk sosial, abdi negara, maupun sebagai warga dunia (*global citizen*). Disiplin dan rasa tanggung jawab selaku warga negara (*self-discipline and responsibility*), peka dan empati terhadap masalah kemanusiaan dan kewarganegaraan, terbuka, toleran, patuh dan sabar terhadap ketentuan negara. Ini merupakan esensi dari pemenuhan hak dan kewajiban bagi warga negara, dalam membentuk warga negara yang *smart and good citizen*. Terimakasih kepada Universitas Bangka Belitung dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung yang sudah memberikan dukungan sehingga artikel ini bisa selesai tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Cahyono, E., Sutomo, N., & Hartono, A. (2019). Literatur Review ; Panduan Penulisan Dan Penyusunan. *Jurnal Keperawatan*, 12(2), 12. Retrieved from <https://ejournal.lppmdianhusada.ac.id/index.php/jk/article/view/43>
- Asyari, D & Dewi, D.A. (2021). *Peran Pendidikan Kewarganegaraan bagi Generasi Milenial dalam menanamkan Jiwa Nasionalisme di Era Globalisasi*. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. 3 (2), 30-41
- Belladonna, A. P., & Anggraena, S. N. (2019). *Penguatan Pengetahuan Kewarganegaraan (Civic Knowledge) Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. 3 (2), 196-210.
- Bettany-Saltikov, J. (2012). *How to do a systematic literature review in nursing: a step-by-step guide*. McGraw-Hill Education (UK).

- Branson, Magaret S., dkk. 1999. *Belajar Civic Education dari Amerika*. Yogyakarta: Kerjasama LKIS dan The Asia Foundation
- Fadilah, & Dkk. (2021). *Pendidikan Karakter*. Bojonegoro: CV. Agrapana Media.
- Fauzi R, & Roza P. (2019). *Implementasi Nilai Kebajikan Warga negara (Civic Virtues) di Institut Teknologi Bandung*. Journal Of Moral and Civic Education. 3 (2), 92-106
- Hartini, S., Siregar, M., & Arifi, A. (2020). *Implementasi Pendidikan Karakter di MTs Negeri Kabupaten Klaten*. Al- Asasiyya: Journal of Basic Education. 4 (1), 14-29
- Hijran, Muhamad; Oktariani, Dini. Peran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Saat Pandemi Covid-19 Menurut Undang-Undang 1945. Jurnal Profit: Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi, [S.L.], V. 8, N. 2, P. 95-101, Nov. 2021. Issn 2620-8504.
- Mulyono, B. (2017). *Reorientasi civic disposition dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya membentuk warga negara yang ideal*. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan. 14 (2), 218-225
- Nurohmah, W., & Dewi, D. A. (2022). Penerapan Nilai -Nilai Pancasila Di Era Globalisasi. Jurnal Kewarganegaraan, 6(1), 1045-1049
- Pangalila, Theodorus. (2017). Peningkatan Civic Disposition Siswa melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. 7 (1), 91- 103
- Reza A. Suntara (2022). *Indonesia Emas 2045 Bukan Isapan Jempol Belaka* . Babel Pos edisi Selasa, 22 Maret 2022
- Reza A. Suntara (2022). *Warge Negara yang Baik*. Babel Pos edisi Kamis, 31 Maret 2022
- Rowley, J., & Slack, F. (2004). Conducting a literature review. Management research news.
- Roza, Prima. (2020). *Digital Citizenship: Menyiapkan Generasi Milineal Menjadi Warga Negara Demokratis di abad Digital*. Jurnal Sosioteknologi. Volume 19, No. 2, 190- 202
- Sujana, I Putu Windu M. (2019). *Civic Virtue Dalam Rangka Mewujudkan Pemilu Harmoni dan Berkeadilan*. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaaan. 1 (2), 63-72
- Waldi, Atri., dkk. (2019). *Penguatan Civic disposition (watak kewarganegaraan) bagi Guru Sekolah Dasar dalam Mempersiapkan Generasi Muda pada Era Revolusi Industri 4.0*. JP-Ipteks Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. 1 (2), 15-23
- Winataputra, Udin S. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Pendidikan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis)*. Bandung; Widya Aksara Press.